

“Kalau semua orang setuju korupsi itu salah, kenapa ia tetap berulang di setiap generasi?”

Diskusi terbuka. Boleh kamu setuju, boleh kamu bantah — yang penting kamu pikir.

"Empat Lensa Membaca Amanah Publik"

Pekan ini linimasa kembali dipenuhi kabar tentang harta publik: dugaan penyelewengan dalam pengadaan batu bara pada perusahaan listrik negara di tengah pemadaman, penetapan tersangka dalam kasus program makan bergizi, dan sorotan pada gaya hidup mencolok sebagian lingkaran kekuasaan di saat pekerja menghadapi pemutusan kerja dan beban pajak. Pola yang berulang ini menimbulkan satu pertanyaan yang mengganggu: jika hampir semua orang sepakat bahwa mengambil yang bukan haknya itu salah, mengapa fenomena ini seolah tak

pernah benar-benar hilang? Jawaban yang mudah adalah menyalahkan "oknum yang serakah". Tetapi jawaban itu terlalu murah. Ada beberapa lensa yang perlu diadu untuk melihat persoalan ini secara utuh.

Lensa pertama, dari ekonomi kelembagaan: korupsi bukan soal moral individu, melainkan soal insentif dan pengawasan. Ketika biaya melanggar rendah dan peluang untung tinggi, pelanggaran menjadi rasional secara ekonomi. Implikasinya, perbaikan menuntut desain sistem — transparansi, audit, hukuman yang pasti. Namun celah lensa ini jelas: sistem dirancang dan dijalankan oleh manusia yang bisa disuap. Pertanyaan yang muncul: siapa yang mengawasi para pengawas, dan apa yang menahan mereka ketika tak seorang pun melihat?

Lensa kedua, dari psikologi sosial: pelanggaran besar hampir selalu bermula dari normalisasi pelanggaran kecil. Fenomena "semua juga begitu" menggeser batas yang dianggap wajar sedikit demi sedikit sampai yang dulu tabu menjadi biasa. Implikasinya, budaya integritas dibentuk di ruang-ruang kecil, bukan hanya di regulasi besar. Tetapi lensa ini pun punya celah: ia menjelaskan bagaimana pelanggaran menyebar, namun tidak menjelaskan mengapa sebagian orang tetap jujur meski seluruh lingkungannya rusak. Pertanyaannya: dari mana datang daya tahan moral yang melawan arus?

Lensa ketiga, dari teologi Islam tentang amanah: konsep *amanah* menempatkan setiap kepercayaan — jabatan, harta, tugas — sebagai titipan yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada institusi, tetapi kepada Allah. Di sinilah muncul dimensi yang tak terjangkau lensa ekonomi maupun psikologi: pengawasan yang tidak pernah tidur. QS. At-Tawba: 34 memberi peringatan keras terhadap mereka yang memakan harta orang dengan jalan batil, dan Sahih Muslim 1738b menggambarkan pengkhianat kepercayaan yang benderanya diangkat di Hari Kiamat. Implikasinya, integritas berakar pada kesadaran diawasi

meski tak ada kamera. Celah lensa ini di ranah publik: kesadaran teologis bersifat personal dan tak bisa dipaksakan lewat undang-undang. Pertanyaannya: bisakah kesalehan privat diterjemahkan menjadi tata kelola publik tanpa memaksakan keyakinan pada yang tidak seiman?

Lensa keempat, dari sejarah dan sosiologi kekuasaan: setiap peradaban menghadapi godaan yang sama — kekuasaan cenderung memusatkan sumber daya dan melindungi diri dari akuntabilitas. Teladan kesederhanaan pemimpin, seperti yang terekam tentang kehidupan Rasulullah ﷺ yang sehari-hari cukup dengan kurma dan air, adalah antitesis historis dari pola itu. Implikasinya, keteladanan dari atas menular ke bawah. Tetapi celahnya: teladan bersifat langka dan tak bisa direplikasi secara massal. Pertanyaan yang menggantung: dapatkah sebuah sistem bertahan hanya dengan berharap pada munculnya pemimpin teladan, atau ia butuh sesuatu yang lebih struktural?

Empat lensa ini menunjukkan bahwa persoalan amanah publik tidak selesai dengan satu pendekatan. Untuk mahasiswa, medan latihannya bukan gedung parlemen, melainkan tempat yang lebih dekat.

Bendahara himpunan yang mengelola dana kegiatan menghadapi versi mini dari ujian yang sama. Panitia acara yang menyusun anggaran, asisten lab yang mengelola inventaris, pengurus organisasi yang memegang uang kas — semua sedang berlatih. Langkah konkret yang bisa dicoba pekan ini: membuka laporan keuangan satu organisasi tempat seorang mahasiswa terlibat dan memeriksa apakah setiap pos jelas asal dan tujuannya. Pembukuan sebaiknya dibuat agar bisa dibaca siapa pun, bukan hanya yang memegang. Ketika ada "kelebihan" kecil yang tak jelas pemiliknya, kembalikan atau catat, jangan diendapkan. Kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang membentuk garis yang tak akan dilanggar saat taruhannya membesar kelak.

Pada akhirnya, yang penting bukan menemukan satu lensa yang benar dan membuang yang lain. Yang penting adalah menyadari bahwa lensa apa pun yang dipilih sebagai prioritas — sistem, budaya, keyakinan, atau

keteladanan — selalu ada lensa lain yang menutupi celahnya. Amanah publik bertahan bukan karena satu benteng, melainkan karena beberapa benteng yang saling menutup titik lemah.

| Pertanyaan

Q · 01

Bukankah ini masalah sistem yang korup, bukan soal moral personal? Ngapain repot-repot ngurusin integritas individu kalau sistemnya sendiri rusak?

A

Sebagian benar — sistem yang buruk memang menciptakan insentif buruk. Tapi sistem tidak jatuh dari langit; ia dirancang, dijalankan, dan dilanggar oleh individu. Reformasi sistemik dan integritas personal bukan pilihan biner. Sistem terbaik pun bocor kalau tidak ada cukup orang yang menolak menyalahgunakannya, dan orang paling jujur pun kewalahan tanpa sistem yang mendukung. Keduanya saling menopang.

Q · 02

Kenapa harus agama yang ngurusin ekonomi dan tata kelola publik? Bukannya itu ranah hukum sekuler yang lebih netral?

A

Agama di sini tidak diposisikan sebagai pengganti hukum, melainkan sebagai sumber motivasi internal yang tidak bisa dijangkau hukum. Hukum mengatur ketika ada bukti dan saksi; konsep amanah bekerja bahkan ketika tak ada yang melihat. Keduanya beroperasi di lapisan berbeda. Menolak salah satunya sama saja meninggalkan satu lapis pertahanan.

Q · 03

Apa bedanya artikel ini dengan moralisme generik "ayo jadi orang jujur"? Terdengar seperti nasihat yang semua orang sudah tahu.

A

Perbedaannya ada pada penolakan terhadap jawaban tunggal. Moralisme generik berhenti pada "jadilah jujur". Tulisan ini justru menunjukkan bahwa kejujuran individu saja tidak cukup tanpa sistem, dan sistem saja tidak cukup tanpa kesadaran diawasi. Ia mengakui kompleksitas, bukan menjualnya sebagai slogan.

Q · 04

Bukankah mengaitkan teladan kesederhanaan Nabi dengan tata kelola modern itu anakronistik? Zaman sudah beda total.

A

Konteks teknisnya memang beda. Tapi yang diambil bukan detail teknis, melainkan prinsip: pemegang amanah menahan diri justru saat punya peluang mengambil lebih. Prinsip itu tidak usang. Yang anakronistik adalah kalau kita menuntut solusi kebijakan abad ini dari teks abad ketujuh — dan itu memang bukan yang dilakukan di sini.

Saya sendiri tidak terlalu religius. Apakah kerangka amanah ini masih relevan buat saya, atau ini cuma buat yang taat beragama?

A

Kerangka amanah punya dua lapis: lapis transenden (pertanggungjawaban kepada Allah) dan lapis universal (kepercayaan yang diberikan orang lain layak dijaga). Lapis kedua berlaku bagi siapa saja yang pernah dipercaya dan tidak ingin mengkhianati kepercayaan itu. Seorang yang tak religius pun bisa memegang prinsip bahwa titipan harus dikembalikan. Bedanya hanya pada dari mana datang daya dorongnya.